

## UPAYA UNICEF DALAM MENANGANI PENGUNGSI ANAK ROHINGGYA DI BANGLADESH PADA TAHUN 2017-2018

Yessi Adeyna Saputri<sup>1</sup>

**Abstract:** *Rohingya child refugees are a person or group of people who are carried or born who are of Rohingya ethnicity who are under the age of 18 years or are in the womb of their mother who is a refugee. In August 2017 the clearance operation was officially carried out by the Myanmar government in response to the actions of the radical Rohingya defenders group ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) who tried to take revenge for all forms of discrimination and violence that the Rohingya have received. The clearance operation that occurred of the 720,000 Rohingya refugees in Bangladesh, about 58% are children and 21% are under the age of five. UNICEF's efforts as an international organization in addressing the rohingya child refugee problem in Bangladesh are through (1) granting aid funds through funding to meet the urgent needs of Rohingya child refugees, (2) child protection services based on gender-based violence and the development of child-friendly spaces and youthspaces, (3) Education for Rohingya child refugees in Bangladesh through running Myanmar curriculum-based learning programmes, skills development programmes and teaching recruitment programmes in education are needed for Rohingya child refugees to save their future, (4) as well as UNICEF's collaboration with the Government of Bangladesh and other partners such as UNHCR, IOM and WFP to realize long-term treatment for Rohingya child refugees in Bangladesh. Bangladesh through repatriation with an agenda of repatriating 1,500 loyal refugees this week, providing id cards for Rohingya refugees in Bangladesh namely "Myanmar Nationals". Together with UNHCR to conduct a joint data collection on the existence of Rohingya child refugees to the maximum because many child refugees are living without their parents and displaced alone in order to get basic needs assistance evenly, together with the IOM to conduct training to health staff for medical consultation services to support the mental health of Rohingya child refugees and refugee condition settings, WFP provides maximum food assistance and prevents Rohingya child refugees from starving.*

**Keywords:** *UNICEF, Bangladesh, Rohingya, Child Refugees, International Organizations.*

### Pendahuluan

Masalah krisis Rohingya kembali menjadi fokus dunia sejak terjadinya operasi pembersihan terhadap etnis Rohingya di wilayah Rakhine, Myanmar utara pada tahun agustus 2017. Rohingya merupakan etnis muslim minoritas yang tinggal di Myanmar yang mendapat perlakuan diskriminasi, kekerasan dan tidak diakuinya sebagai salah satu bagian dari etnis di Myanmar. Operasi pembersihan secara resmi dilakukan oleh pemerintah Myanmar sebagai respon atas aksi kelompok radikal pembela Rohingya yaitu ARSA (*Arakan Rohingya Salvation Army*) yang mencoba untuk membalas dendam atas segala bentuk tindak diskriminasi dan kekerasan yang telah etnis Rohingya terima dengan menyerang sebanyak 30 kantor polisi dan membunuh lebih dari 20 petugas polisi serta anggota pasukan keamanan ([msg.org](http://msg.org), 2018). Dalam operasi pembersihan ini etnis Rohingya dipaksa keluar dari Myanmar dengan menghancurkan sekitar 214 ratusan desa etnis Rohingya, membakar sekitar 7.000 rumah, membunuh sekitar 9.000 pria Rohingya

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : yessiadeynasaputri26@gmail.com.

dan melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan Rohingya serta sekitar 176 desa telah dikosongkan. Akibat dari operasi pembersihan yang terjadi menyebabkan lebih dari 720.000 etnis Rohingya melakukan pengungsian dalam skala besar dengan melintasi sungai Yordan ke kamp Kutupalong, Cox's Bazar di Bangladesh yang merupakan tempat pengungsian terbesar di dunia bagi pengungsi Rohingya (Lee Ronan, 2021). Pengungsian yang dialami etnis Rohingya ini bukan untuk pertama kalinya terjadi, sejak kemerdekaan Bangladesh tahun 1971, etnis pengungsi Rohingya mengalami empat arus pengungsian, yaitu pada tahun 1977-1978, tahun 1991-1993, tahun 2012, dan tahun 2017 (menjadi yang paling besar) (Kawser dan Mohuiddin, 2020).

Keprihatinan Bangladesh terkait lonjakan pengungsi etnis Rohingya yang terus-menerus terjadi menjadi sebuah permasalahan yang harus diselesaikan, ini didasari pada tingkat kesulitan yang dirasakan pemerintah bukan hanya dalam mengontrol jumlah pengungsi tetapi juga dalam membantu dan memfasilitasi segala kebutuhan yang layak untuk etnis Rohingya selama mengungsi di Bangladesh. Permasalahan pengungsi Rohingya yang terjadi semakin diperburuk dengan fakta bahwa jumlah pengungsi anak Rohingya jauh lebih besar yaitu separuh dari keseluruhan jumlah pengungsi yang ada. Pada tahun 2017 terhitung dari 720.000 jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh terdapat sekitar 58% merupakan anak-anak dan 21% dari mereka masih berusia di bawah lima tahun (bbc.com, 2017). Hal ini menyebabkan permasalahan pengungsi anak menjadi fokus utama pemerintah Bangladesh. Pemerintah Bangladesh beranggapan bahwa pengungsi anak menjadi hal utama yang harus ditangani secara maksimal. Bangladesh melihat anak-anak sangat rentan dalam segi fisik maupun mental terkena penyakit dan trauma. Padatnya jumlah pengungsi yang sangat tidak terkendali membuat kondisi pengungsi anak kian memperhatikan.

Bangladesh melalui United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) sebagai organisasi internasional khusus yang menangani permasalahan seluruh anak-anak di dunia memaksimalkan kinerja dalam menangani permasalahan pengungsi anak Rohingya di Bangladesh. UNICEF merupakan organisasi yang secara khusus yang dibentuk oleh PBB pada tanggal 11 Desember 1946 (unicef.org, 2017). UNICEF dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan pada Konvensi Hak Anak tahun 1989. UNICEF berfokus pada pemenuhan hak setiap anak di seluruh dunia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan, memastikan bayi-bayi lahir mempunyai awal hidup yang baik, memajukan pendidikan bagi anak-anak perempuan, melindungi dari wabah penyakit dan menjaga kesehatan mereka serta mengurangi penderitaan akibat bencana alam dan peperangan/konflik khususnya di negara berkembang. Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi yang menangani khusus pemenuhan hak anak, UNICEF juga memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak yang berstatus pengungsi.

UNICEF mendapati banyak sekali permasalahan yang terjadi terhadap pengungsi anak Rohingya. Pengungsi anak Rohingya rentan terhadap berbagai tindak kejahatan, seperti perdagangan anak, pemerkosaan, pelecehan seksual dan pengadaan buruh anak oleh masyarakat lokal setempat. Banyak dari mereka yang mengalami gangguan psikis berat dan trauma. Penyebaran penyakit di kamp-kamp yang menyerang pengungsi anak usia dibawah lima tahun seperti kolera, kurang gizi, diare, rubella dan polio. Fasilitas yang tidak memadai menyebabkan krisis sanitasi di kamp-kamp pengungsian. Penyebaran penyakit yang tidak diimbangi oleh pemberian obat-obatan dan vaksin bagi pengungsi anak, sehingga situasinya semakin memburuk. UNICEF mencatat sekitar

lebih dari 12 anak /pekan yang meninggal karena kurangnya tenaga medis dan telatnya penanganan untuk mereka ([unicef.org](http://unicef.org), 2017). Segala bentuk permasalahan yang terjadi terhadap pengungsi anak Rohingya di Bangladesh sangat diharapkan mampu untuk teratasi sepenuhnya. Pengungsi anak Rohingya yang tidak mampu untuk mendapat penghidupan yang layak agar dapat terpenuhi kebutuhannya menjadi selayak mungkin. Dibutuhkan UNICEF sebagai organisasi internasional khusus anak untuk dapat menangani permasalahan pengungsi anak Rohingya di Bangladesh tahun 2017-2018.

## **Kerangka Teori**

### **1. Konsep Organisasi Internasional**

Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. Dalam mencapai tujuannya organisasi internasional tentu harus menjalankan fungsi organisasi dengan baik. Adapun fungsi dari organisasi internasional sebagai berikut:

- a. Artikulasi dan Agregasi  
Organisasi internasional berfungsi sebagai instrumen bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya.
- b. Norma  
Organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrument yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik internasional.
- c. Rekrutmen  
Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.
- d. Sosialisasi  
Sosialisasi merupakan upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem.
- e. Pembuat peraturan  
Keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian, adhoc, atau oleh organisasi internasional.
- f. Pelaksanaan peraturan  
Pelaksanaan keputusan organisasi internasional hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara.
- g. Pengesahan peraturan  
Organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan atura-aturan dalam sistem internasional.
- h. Informasi  
Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengelolaan dan penyebaran informasi.
- i. Operasional

Fungsi pelaksanaan yang dilakukan organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh UNICEF yang melakukan perlindungan terhadap anak-anak, dan lain sebagainya ([disctio.id](http://disctio.id), 2017).

UNICEF (*United Nations Children's Emergency Fund*) merupakan sebuah organisasi internasional khusus yang telah diresmikan pada tanggal 11 desember 1946 ([May T. Rudy, 2014](#)). UNICEF dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Konvensi Hak Anak 1989 sebagai prinsip-prinsip dalam mewujudkan fungsi dan tujuan organisasi untuk menangani permasalahan anak-anak di seluruh dunia. Konvensi ini mengatur bagaimana seharusnya dan sewajibnya seorang anak diberlakukan diluar dari anak tersebut yatim piatu maupun tidak ([Muladi, 2009](#)). Peneliti khususnya menggunakan dasar teori organisasi internasional dengan menggunakan UNICEF untuk membahas lebih rinci mengenai Upaya UNICEF dalam membantu pengungsi anak Rohingya di Bangladesh pada tahun 2017-2018.

## 2. Konsep Humanitarian Action (Aksi Kemanusiaan)

*Humanitarian Action* atau aksi kemanusiaan merupakan bentuk aksi nyata kemanusiaan yang bekerja melewati batas-batas negara dan aktor pelaksana bukan hanya negara mencangkup pula aktor non-negara yang menolong siapapun sedang dalam situasi konflik, terkena dampak perang dan bencana alam untuk memenuhi bantuan-bantuan kemanusiaan yang secara aktif dirancang guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan dan memulihkan harkat serta martabat manusia paska bencana, konflik, peperangan dalam keadaan darurat berskala besar dengan bantuan nyata dalam bentuk materil, layanan dan perawatan medis.

Aksi kemanusiaan ini memenuhi kebutuhan berupa bantuan fisik dan jasa. Bantuan-bantuan kemanusiaan tersebut disebut dengan *humanitarian aid*. Yang menyediakan bantuan tersebut merupakan aktor-aktor kemanusiaan yaitu organisasi internasional, pemerintah suatu negara, perusahaan privat, individu dan aktor lainnya. Bantuan kemanusiaan berbentuk material dan perlindungan. Aksi kemanusiaan ini memiliki prinsip-prinsip yang menjadi acuan dasar dalam melaksanakan berbagai kegiatan kemanusiaan. Semua manusia mempunyai hak untuk diperlakukan selayaknya manusia dan berhak atas segala bentuk bantuan kemanusiaan, mendapat perlindungan sebagai manusia ([allindiary.org](http://allindiary.org), 2018).

### a. *Humanity*

Dimaksudkan bahwa aksi kemanusiaan yang dilakukan benar-benar adanya dan murni hanya untuk menolong dan melindungi siapapun yang sedang dalam penderitaan.

### b. *Impartial*

Dimaksudkan bahwa aksi kemanusiaan yang dilakukan harus bebas dari kata diskriminasi.

### c. *Neutrality*

Dimaksudkan bahwa aksi kemanusiaan tidak terlibat dalam situasi konflik dan memihak dalam permusuhan atau kontroversi yang bersifat politik, agama dan ideologi.

### d. *Independence*

Dimaksudkan bahwa organisasi kemanusiaan tidak boleh memiliki hubungan ataupun kepentingan dengan pihak yang sedang berkonflik

Menjalankan prinsip-prinsip kemanusiaan menjadikan para aktor kemanusiaan lebih mudah untuk menjalankan tugas mereka (Europa.eu, 2021). Dasar hukum yang diterapkan oleh aksi kemanusiaan dalam bentuk bantuan kemanusiaan adalah berdasarkan Konferensi Jenewa tahun 1951, Protokol New York 1967 dan alat hukum internasional tentang kemanusiaan, pengungsi, HAM, perang dan bencana alam. Seperti halnya, UNICEF sebagai organisasi internasional yang langsung memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan berupa makanan, air bersih, akses kesehatan, sanitasi dan tempat perlindungan kepada para pengungsi anak Rohingya di Bangladesh.

### Metode

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah jenis penelitian deskriptif. Penulis mendeskripsikan mengenai upaya UNICEF dalam menangani pengungsi anak Rohingya pada tahun 2017-2018. Adapun jenis data yang digunakan penulis ialah jenis data sekunder dengan mengumpulkan dari berbagai sumber-sumber yang ada, melalui *website*, buku-buku, arsip dokumen dan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi literatur. Teknik analisa data yang digunakan ialah kualitatif dengan menganalisis data-data sekunder yang didapat menggunakan konsep organisasi internasional dan *humanitarian action* untuk menjelaskan upaya UNICEF dalam menangani pengungsi anak Rohingya di Bangladesh.

### Hasil dan Pembahasan

Pengungsi anak Rohingya merupakan seorang atau sekelompok orang yang terbawa ataupun terlahir yang berasal dari etnis Rohingya yang berusia dibawah 18 tahun atau sedang berada dalam kandungan ibunya yang berstatus sebagai pengungsi. Keberadaan pengungsi anak Rohingya bermula pada tahun 1978 dimana sekitar 250.000 etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh yang diakibatkan dari tindak kekerasan dan diskriminasi oleh pemerintah Myanmar. Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar menerapkan UU Kewarganegaraan yang mana dirancang untuk menghapuskan Rohingya dari 135 etnis yang diakui di Myanmar sekaligus menghapus hak-hak dasar Rohingya (Yasyid, 2017). Pada tahun 1991, paska penerapan UU tersebut mengakibatkan hampir 300.000 Rohingya melarikan diri dikarenakan semakin meluasnya kekejaman terhadap Rohingya seperti kerja paksa, pemungutan pajak yang sewenang-wenang, penyiksaan dan pemerkosaan serta penganiayaan.

Pada tahun 2012 terjadi konflik sipil di Myanmar antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya yang mengakibatkan lebih dari 250.000 pengungsi Rohingya kembali melakukan pengungsian ke Bangladesh untuk mendapat perlindungan. Puncak tragedi Rohingya ini terjadi pada tahun 2017 dimana terdapat lebih dari 720.000 Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh dikarenakan operasi pembersihan etnis yang dilakukan pemerintah Myanmar (Kolovos, 2018). Dalam operasi tersebut, pemerintah Myanmar dan masyarakat sekitar wilayah Rakhine yang kontra terhadap keberadaan etnis Rohingya membakar rumah-rumah etnis Rohingya. Para tentara dalam operasi tersebut bahkan tidak segan untuk membunuh dengan brutal etnis Rohingya yang melakukan perlawanan. Para tentara mengumpulkan beberapa lelaki etnis Rohingya yang diduga melakukan perlawanan dan kemudian membunuh mereka. Wanita etnis Rohingya juga disekap dan dilecehkan secara seksual oleh para tentara tersebut. Kekerasan terhadap anak-anak Rohingya di Myanmar tercatat sekitar 730 anak-anak dibawah umur lima tahun dibunuh, sebesar 59,1 % dari mereka dibunuh dengan cara ditembak, dan 14,8 %

dibakar bersama dengan rumah-rumah mereka serta 6,9% dibunuh dengan cara dipukul ([msg.org](http://msg.org), 2018).

Anak-anak juga menjadi korban dari kekejaman operasi tersebut, dimana mereka ditembak bersama dengan orang tua mereka. Terdapat pula anak-anak yang mengungsi tanpa keluarga mereka maupun tanpa didampingi oleh orang tua mereka yang kemudian selama perjalanan mengungsi ke Bangladesh mereka meninggal karena kelaparan. UNICEF mengatakan terdapat sekitar 58% dari pengungsi etnis Rohingya merupakan anak-anak, dan 21% dari mereka merupakan anak dibawah umur lima tahun yang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan atas mereka yang entan terhadap segala bentuk kejahatan dan gangguan kesehatan lainnya. Krisis pengungsi Rohingya yang telah terjadi berlarut-larut menuntut anak-anak dan remaja Rohingya agar dapat kehidupan yang layak dipengungsian. Pengungsi anak Rohingya menuntut lebih banyak hak untuk dapat bertahan hidup dan menginginkan masa depan yang layak untuk mereka. Selama dipengungsian di Bangladesh pengungsi anak rentan terhadap segala bentuk kejahatan seperti eksploitasi terhadap anak, perdagangan anak dan pelecehan seksual. Pengungsi anak memiliki resiko terhadap tekanan psiko-sosial, penelantaran, pelecehan, kekerasan seksual, pernikahan anak, pekerja anak dan perdagangan anak, kondisi mereka setelah tiba di pengungsian dalam keadaan traumatik dan mengalami stres berat terkait kekerasan yang telah terjadi kepada mereka.

Sejak Oktober 2018, tercatat sekitar 6.100 anak yang tidak memiliki keluarga ataupun terpisah dengan keluarga mereka yang rentan dan beresiko tinggi terhadap perdagangan anak, pelecehan dan eksploitasi di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Sekitar 57% anak dibawah umur 14 tahun yang beresiko tinggi terhadap eksploitasi seksual, pelecehan, dan penelantaran ([unicef.org](http://unicef.org), 2020). Anak laki-laki beresiko tinggi menjadi pekerja anak, eksploitasi anak dan perdagangan, dimana sangat dibutuhkan pengawasan bentuk-bentuk pekerjaan yang melibatkan anak-anak di usia muda. Penyebaran penyakit seperti campak, cacar, rubella, folio dan kolera di kamp-kamp menyerang pengungsi anak Rohingya yang memiliki daya tahan imun yang buruk dan sebagian besar dari mereka meninggal akibat penyakit tersebut. Kekurangan gizi juga semakin banyak menyerang pengungsi anak Rohingya yang berumur dibawah lima tahun. Makanan-makanan yang tidak memenuhi standar gizi dan kurangnya pasokan makanan membuat mereka banyak mengalami gizi buruk. Permasalahan ini menyebabkan meningkatnya status darurat penyakit bagi pengungsi anak Rohingya di Bangladesh. Penyakit yang terus meningkat ini tidak diimbangi dengan pemberian vaksin yang cukup bagi pengungsi anak Rohingya di Bangladesh. Sekitar lebih dari 12 anak/pekan meninggal karena kurangnya tenaga medis.

Akibat dari pengungsian etnis Rohingya yang terjadi dalam jumlah besar dan berkelanjutan menjadi masalah bagi Bangladesh. Bangladesh menganggap arus pengungsi etnis Rohingya yang terus bertambah membuat Bangladesh beban yang akan mempengaruhi kestabilan negara. Bangladesh dihadapi dengan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat dari krisis Rohingya yang terus berlanjut. Dampak ekonomi yang dirasakan Bangladesh ialah terganggunya struktur ekonomi lokal dan pekerjaan. Komunikasi terkait bahasa yang sama antara masyarakat lokal di Cox's Bazar dengan pengungsi Rohingya menjadi ancaman bagi Bangladesh dikarenakan banyak masyarakat lokal yang mudah akrab dan menjalin interaksi. Banyak dari masyarakat lokal setempat dan pekerja harian beralih untuk menjadi sukarelawan /tenaga kerja sukarela di kamp-kamp pengungsian melalui lembaga bantuan. Peluang kerja relawan yang sudah tersedia menyebabkan kekurangan tenaga kerja dalam pasar lokal seperti

petani yang kekurangan tenaga kerja masyarakat lokal setempat. Di Pulau Saint Martin Cox's Bazar wisatawan yang datang sangat rendah karena ketidakstabilan di sepanjang perbatasan Bangladesh – Myanmar lalu lintas kabar dilarang keras untuk berlabuh. *Cox's Bazar Tour Operators* menyatakan bahwa Bangladesh berisiko kehilangan sekitar satu juta wisatawan.

Dampak sosial yang dirasakan Bangladesh ialah masyarakat lokal mengalami masalah multidimensi akibat keberadaan Rohingya, sebelumnya mereka yang dapat bergerak dengan bebas di tanah mereka berubah menjadi sangat terbatas. Masyarakat lokal diwajibkan membawa kartu identitas nasional yang menandakan bahwa mereka merupakan warga negara Bangladesh. Penghasilan mereka pun terganggu dimana lahan untuk mengembalakan ternak menjadi tempat berdirinya kamp-kamp pengungsian untuk pengungsi Rohingya. Masyarakat lokal juga yang biasanya mendapatkan fasilitas kesehatan dan konseling gratis dan perawatan kesehatan, tunjangan yang diberikan oleh LSM dan lembaga internasional menjadi berhenti memberikan layanan terhadap mereka dan memfokuskan lebih untuk pengungsi Rohingya. Adapun dampak terhadap lingkungan akibat lonjakan pengungsi Rohingya yang mempengaruhi perluasan kawasan pengungsian mengakibatkan hilangnya kawasan hutan sekitar 3.500 hektar dari total luas hutan 2.092.016 hektar di wilayah Cox's Bazar. Bangladesh mengalami kerugian sekitar 1,67% di kawasan hutan Cox's Bazar dan kehilangan 0.05% dari total kawasan hutan nasional yang senilai lima miliar taka. Ditambah lagi pengungsi Rohingya membutuhkan pasokan kayu bakar untuk memasak, mereka mengumpulkannya di sekitar kamp-kamp pengungsian yang menyebabkan lahan hutan seluas 26.000 hektar akan rusak karena biomassa dan produktivitas yang rendah (Kudrat E, 2020).

Masalah pengungsi Rohingya ini yang berlarut-larut terkait repatriasi pengungsi Rohingya yang tidak berjalan baik memicu timbulnya ketegangan politik antar keduanya. Ketegangan hubungan politik ini ditambah dengan tidak adanya itikad baik oleh Myanmar terkait penyelesaian krisis manusia. Bangladesh telah melakukan segala upaya untuk menegaskan pemerintah Myanmar bahwa krisis Rohingya ini harus diselesaikan agar Pengungsi Rohingya bisa kembali ke Myanmar dengan aman dan damai. Bangladesh pun hingga saat ini belum mendapat respon yang positif oleh Myanmar dan ini akan mempengaruhi hubungan kedua negara di masa depan (Kudrat E, 2020).

UNICEF berupaya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi pengungsi anak Rohingya di Bangladesh. Dilihat dari kondisi krisis pengungsi anak Rohingya di kamp-kamp pengungsian, UNICEF berpendapat bahwa melakukan aksi kemanusiaan menjadikan salah satu cara dalam mengatasi situasi yang darurat atau yang paling mendesak. Aksi kemanusiaan melalui bantuan kemanusiaan dan perlindungan itu sendiri dilakukan sebagai bentuk operasionalisasi untuk mewujudkan alokasi bantuan secara nyata dalam bentuk bantuan dana, layanan dan perawatan medis. Upaya UNICEF dalam menangani pengungsi anak Rohingya di Bangladesh pada tahun 2017-2018, sebagai berikut:

#### **a. Pemberian Bantuan Dana Darurat**

UNICEF sebagai organisasi khusus yang menangani permasalahan anak-anak di dunia telah menggalang dana bantuan untuk pengungsi anak Rohingya di Bangladesh. UNICEF merupakan organisasi yang memiliki sistem kerja yaitu dengan menggalang dana bantuan darurat guna melalui program-program kerja kemudian merealisasikannya dalam bentuk nyata melalui kegiatan-kegiatan secara langsung. Pada 02 Oktober 2017,

UNICEF telah mengeluarkan dana sebesar US\$ 76,1 juta untuk membantu sebanyak 720.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh yang 58% dari pengungsi tersebut ialah anak-anak ([unicef.org](http://unicef.org), 2017). Pendanaan tersebut sebagai bentuk upaya UNICEF untuk memenuhi kebutuhan pengungsi anak Rohingya yang bersifat sangat darurat di kamp pengungsian Bangladesh pada tahun 2017. Bantuan dana darurat ini berhasil memenuhi sebagian kebutuhan darurat bagi pengungsi anak Rohingya yang baru saja tiba dipengungsian, begitu pun yang telah berada di pengungsian.

UNICEF memenuhi 21% kebutuhan sanitasi, air bersih, dan air minum sekitar 101.000 telah dibangun dari 450.000 target operasi. Di bidang kesehatan menjadi target operasi yang paling mencapai target yaitu sebanyak 57% berhasil menyentuh pengungsi anak Rohingya sekitar 135.000 anak. Begitu pula nutrisi yang mencapai 11 % dari target operasi yaitu sebanyak 1000 anak. Keberhasilan pemenuhan kebutuhan mendesak pengungsi anak Rohingya yang walaupun tidak sepenuhnya dapat terpenuhi telah menjamin keberlangsungan hidup pengungsi anak Rohingya di kamp-kamp pengungsi secara layak. Pengungsi anak Rohingya sudah bisa mengakses penuh fasilitas sanitasi yang telah dibangun dimana ini mencegah merebaknya penyakit seperti diare dan kolera.

Pada tahun 2018, UNICEF kembali menggalang dana darurat sebesar \$59,9 juta dari target dana yang dibutuhkan sebesar \$149,8 juta ([unicef.org](http://unicef.org), 2018). Setahun paska pengungsian, UNICEF kembali menangani sebagian besar bantuan yang bersifat darurat untuk pengungsi anak Rohingya yang pada tahun sebelumnya tidak dapat terpenuhi secara maksimal, meliputi: Nutrisi, Kesehatan, Kebersihan, upaya yang dilakukan UNICEF ini menggambarkan bagaimana bantuan-bantuan kemanusiaan itu sangat dibutuhkan, terutama bagi anak-anak. Kondisi yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan hidup yang layak di pengungsian menyebabkan mereka bahkan tidak sanggup untuk mengurus diri mereka sendiri, terlebih lagi bagi pengungsi anak yang kehilangan keluarga dan orang tuanya. Bantuan kemanusiaan menjadi hal yang sangat efektif untuk dilakukan dalam kondisi yang darurat untuk memenuhi segala kebutuhan mendesak selama mengungsi. Lantas, ini menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai hal yang utama dilakukan bagi UNICEF untuk menjalankan fungsi operasionalnya dalam berupaya menangani berbagai permasalahan anak di seluruh dunia

#### **b. Layanan Perlindungan Pengungsi Anak Rohingya**

UNICEF terus memantau dan mengadvokasi akses ke wilayah pengungsian, mencegah segala bentuk penolakan hak-hak terhadap pengungsi anak, melakukan peningkatan pencatatan dan pengarsipan berkelanjutan terhadap semua pengungsi anak perempuan dan laki-laki. UNICEF juga mendesak strategi berlandas masyarakat dan mengadakan layanan untuk pengungsi anak yang beresiko mendapat perlindungan dari semua usia dengan permasalahan yang beragam, memperkuat dukungan pemerintah dan lokal, menawarkan hidup berdampingan dengan damai dan meningkatkan pergaulan sosial antara pengungsi dan komunitas tuan rumah serta mengajukan pendekatan sistematis dan multi-sektoral untuk perlindungan. UNICEF membagi upaya melakukan perlindungan menjadi dua kategori yaitu berdasarkan: kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak.

Pada tahun 2017-2018 dana bantuan darurat itu berjumlah USD 19,4 juta yang telah menjangkau sebanyak 477.982 pengungsi anak Rohingya di Bangladesh. Dana bantuan tersebut untuk menjangkau pengungsi anak Rohingya yang membutuhkan layanan dukungan psikososial paska trauma ([reliefweb.int](http://reliefweb.int), 2018). Terdapat beberapa layanan kekerasan berbasis gender, meliputi: kekerasan terhadap anak, pelecehan



seksual, buruh anak. Pada November 2018 hanya sedikitnya perlindungan yang dapat ditangani yaitu sekitar 43% sehingga diperlukannya manajemen khusus untuk GBV. UNICEF mendukung adanya dukungan program psikososial untuk pengungsi anak Rohingya di tempat pengungsian di Bangladesh, diantaranya dibuatnya 34 kamp untuk pengungsi anak yang mencangkup layanan pengelolaan kasus, akses dukungan psikososial, kesehatan fisik, penanganan pemerkosaan secara klinis, layanan konseling dan penyediaan tempat yang aman bagi wanita dan anak-anak perempuan sebanyak 5 kamp hanya dapat menjangkau sekitar 25-50% dari layanan *gender based violence*; dan 8 kamp lainnya menjangkau sekitar 25% layanan.

Keterbatasan penggunaan layanan yang ada di pengaruhi oleh pengungsi wanita dan anak perempuan yang membatasi pergerakan mereka serta rasa takut dan khawatir untuk keluar dari tempat perlindungan mereka. Mereka juga tidak dapat menjangkau layanan kesehatan dimana hampir 56% tidak mendapatkan akses manajemen klinis pemerkosaan dan layanan kesehatan terkait organ reproduksi dan seks yang mana sangat penting untuk mencegah kehamilan dini dan penyakit melalui hubungan seks. UNICEF kemudian semakin memperluas akses manajemen klinis pemerkosaan dan layanan kesehatan seksual serta alat reproduksi bersama dengan pelatihan staff medis dan melengkapi fasilitas kesehatan guna menghasilkan pelayanan klinis yang berkualitas.

Dibuatnya kamp-kamp layanan untuk GBV, ruang ramah anak dan ruang remaja telah mampu mencegah trauma dan masalah psikis pengungsi anak maupun pengungsi wanita Rohingya di Bangladesh secara berkelanjutan, walaupun belum sepenuhnya dapat menjangkau pengungsi anak dan wanita tetapi beberapa pengungsi anak sudah mampu bersosialisasi dan bermain bersama teman-teman lainnya, begitupun wanita dewasa sudah bisa mengikuti berbagai macam pelatihan kemampuan dasar untuk dapat bertahan hidup di Bangladesh

Terdapat sekitar 58% pengungsi anak membutuhkan penanganan perlindungan segera. Pengungsi anak menghadapi permasalahan yang serius terkait tekanan kejiwaan, pengabaian, perundungan, pemisahan dari pengasuh, kekerasan seksual, pernikahan dini, buruh anak, dan perdagangan anak. Pengungsi anak Rohingya sedang mengalami gangguan psikis yang sangat serius terkait setelah menyaksikan pembantaian dan kekerasan yang ekstrem di Myanmar, ditambah mereka mengalami stress berat terkait kondisi hidup yang tidak pasti selama berada di masa pelarian maupun setiba di pengungsian. Sekitar 6.100 anak yang telah terdaftar kehilangan keluarga yang hidup sendiri menyebabkan semakin tinggi resiko menjadi korban perdagangan dan penganiayaan. Sekitar 57% anak remaja mengalami eksploitasi seksual, pernikahan dini, perundungan dan penelantaran anak.

UNICEF menciptakan program perlindungan bagi pengungsi anak Rohingya di kamp pengungsian, yaitu: ruang ramah anak dan ruang remaja. UNICEF melalui ruang ramah anak (*Child Friendly Space*) secara statis dan cepat telah membangun sebanyak 97 ruang untuk pengungsi anak Rohingya. Ruang ini dirancang sebagai tempat untuk menciptakan lingkungan perlindungan yang diharapkan dapat melindungi pengungsi anak yang sangat rentan terhadap kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi terutama anak perempuan. Terdapat sekitar 180.000 anak yang telah menjangkau aktivitas di *Child Friendly Space* dan menjadi tempat untuk anak-anak yang membutuhkan dukungan khusus ([unicef.org](http://unicef.org), 2017). UNICEF juga bekerjasama dengan Bulan Sabit Merah dan mitra lainnya untuk melacak dan melakukan reunifikasi terhadap keluarga pengungsi anak Rohingya yang telah terpisah jauh serta memberikan berbagai macam dukungan pada korban kekerasan seksual anak.

UNICEF juga membangun ruang remaja (*Adolescent space*) dimana terdapat 309 ruang kelompok remaja yang berada di beberapa kamp-kamp pengungsian ([unicef.org](http://unicef.org), 2017). UNICEF menciptakan ruang ini sebagai ruang khusus untuk para remaja dalam mengembangkan keterampilan hidup, menyediakan fasilitas rekreasi dan melakukan kegiatan menyenangkan serta menyediakan layanan dukungan psikologis sosial.

### c. Layanan Program Pendidikan untuk Pengungsi Anak Rohingya

Pada tahun 2017-2018, pemenuhan pendidikan untuk pengungsi anak Rohingya di pengungsian juga berhasil ditangani secara mendesak sekitar 201.800 anak. UNICEF juga menjangkau lebih dari 115.029 anak berusia 4-19 tahun untuk mendapat pendidikan darurat non-formal dan melatih pengungsi usia 18 tahun untuk mendukung pengajaran.

Tabel 4. 1 Dana Bantuan dalam program pendidikan tahun 2017-2018

Program Pendidikan	Dana Darurat	Target Capai
Tahun 2017	\$ 13 Juta	201.800 anak
Tahun 2018	\$14,6 Juta	117.791 anak
Total	\$ 27,6 Juta	319.591 anak

Sumber : [www.unicef.org](http://www.unicef.org)

Unicef memiliki program untuk lebih memperluas akses pendidikan bagi pengungsi anak Rohingya yang berada di Bangladesh agar pengungsi anak Rohingya mendapatkan hak-hak mereka terkait pemenuhan di bidang Pendidikan untuk menyelamatkan masa depan etnis tersebut. UNICEF melalui program berbasis kurikulum Myanmar untuk pengungsi anak Rohingya dikarenakan keinginan pengungsi anak Rohingya untuk bersekolah berdasarkan kurikulum Myanmar dimaksudkan agar dapat membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam sistem pendidikan dan masyarakat Myanmar sampai pada pemulangan sukarela, aman dan bermartabat dapat dilakukan sepenuhnya. UNICEF memberikan program pendidikan informal kepada 220.000 pengungsi anak Rohingya yang berusia 4-14 tahun dengan berdasarkan pada kurikulum yang dibuat khusus yang disebut sebagai Kerangka dan Pendekatan Kompetensi Pembelajaran (LCFA). Sebagian besar pengungsi anak Rohingya belajar LCFA pada tingkat satu dan dua yaitu setara dengan tingkat Paud hingga kelas 2 sekolah dasar dalam system pendidikan sekolah formal. Tingkatan tertinggi LCFA yaitu pada level tiga dan empat yang mana setara dengan kelas 3 dan 4 di sekolah dasar ([Reidy, 2021](#)).

Program pengembangan keterampilan untuk pengungsi remaja Rohingya. UNICEF juga mendukung pengembangan pendidikan dan pembelajaran bagi pengungsi anak Rohingya yang berusia 15-18 tahun untuk menerima literasi, berhitung, keterampilan hidup dan pelatihan kejuruan sebanyak lebih dari 18.000 remaja Rohingya. Akan tetapi, kesenjangan masih tetap ada terkait program yang berfokus remaja ini perlu ditingkatkan untuk menjangkau semua remaja Rohingya berusia 15-18 tahun yaitu sekitar 74.000 remaja. Pendidikan memiliki peran penting bagi masa depan pengungsi anak Rohingya, anak-anak perlu berkembang dan terus belajar demi memiliki kehidupan yang layak dimasa depan. Tanpa adanya kesempatan untuk belajar, mereka lebih berbahaya menjadi sasaran perdagangan manusia, pernikahan anak, eksploitasi dan pelecehan. Program ini membantu memperdayakan anak perempuan muda dan anak laki-laki membangun kepercayaan diri mereka dan melengkapi mereka dengan investasi yang tepat dalam bidang pendidikan dan dapat berkontribusi lebih banyak untuk etnis mereka.

UNICEF untuk mencapai target pengajaran dengan meningkatkan rekrutmen tim pengajar melalui dari etnis Rohingya maupun dari masyarakat Bangladesh itu sendiri yang memenuhi kualifikasi serta pengalaman di bidang akademik yang sesuai. UNICEF merekrut dan melakukan pelatihan terhadap 250 guru tambahan untuk menunjang program pengajaran disamping dari 8.900 guru yang telah ada. Dalam program pengajaran nanti akan diintegrasikan ke dalam kurikulum Myanmar yang ditingkatkan dan diperluas untuk menjangkau lebih banyak anak, dimana pengajaran tersebut akan memfokuskan pada Bahasa Burma, Inggris, matematika, sains dan studi sosial yang akan diperkenalkan secara bertahap (Reidy, 2021).

**d. Kolaborasi UNICEF dengan mitra kerja demi mewujudkan penanganan jangka Panjang untuk menangani pengungsi anak Rohingya.**

Upaya penanganan masalah yang bersifat *long-term* melalui kolaborasi dengan pemerintah Bangladesh dan Organisasi Internasional lainnya yaitu penanganan terkait bantuan kemanusiaan, identitas dan repatriasi pengungsi anak Rohingya di Bangladesh. UNICEF bersama mitra kerjanya menggalang dana bantuan dan melakukan aksi kerja nyata untuk pengungsi Rohingya di Bangladesh. Bangladesh bersama dengan UNHCR melaksanakan upaya Repatriasi terkait keberadaan pengungsi Rohingya termasuk pengungsi anak Rohingya di pengungsian yang telah melebihi daya tampung. Pada tahun 2017, pemerintah Bangladesh mengadakan pertemuan dengan pemerintah Myanmar terkait kesepakatan *Arrangement on Return of Displaced Persons from Rakhine State* dengan agenda untuk melakukan repatriasi terhadap 1.500 orang tiap minggunya kembali ke Myanmar dalam kurun waktu dua tahun.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Aung San Suu Kyi dan Menteri Luar Negeri Bangladesh pada tanggal 23 November 2017. Akan tetapi, situasi yang tidak terkendali di Myanmar membuat mereka ragu untuk menjalankan repatriasi. Trauma akan tindak kekerasan yang berulang membuat daftar syarat yang harus dipenuhi Myanmar agar mereka dapat secara sukarela kembali, syarat tersebut: pengembalian tanah rampasan, perbaikan terhadap rumah, sekolah dan masjid, pembebasan tahanan etnis Rohingya, menuntut tanggung jawab Myanmar terkait kekejaman yang mereka dapat. Pada Januari 2018, setelah dua bulan kesepakatan repatriasi yang dijadwalkan belum juga dilaksanakan. Bangladesh mengatakan terhambatnya pelaksanaan dikarenakan verifikasi data pengungsi Rohingya belum juga selesai.

Rohingya telah kehilangan identitas kewarganegaraannya untuk waktu yang lama. Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal yang menetap di wilayah Rakhine dan mendapat diskriminasi terkait agama dan ras oleh masyarakat Myanmar. Menanggapi krisis identitas pengungsi ini Bangladesh sebagai negara kedua mengeluarkan kartu identitas pengungsi sebagai "*Myanmar Nationals*". Seluruh pengungsi Rohingya termasuk anak-anak juga secara biometrik telah terdaftar di Departemen Imigrasi dan paspor Bangladesh dan menerima tiga jenis bantuan kemanusiaan, yaitu: bantuan material, bantuan medis, tempat tinggal

UNICEF dalam menjalankan tugasnya yaitu mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kelayakan kehidupan pengungsi anak Rohingya tentunya tidak dapat bekerja dengan sendiri. UNICEF banyak melakukan kolaborasi terkait pemenuhan bantuan kemanusiaan berupa pendanaan darurat kebutuhan dasar pengungsi anak Rohingya di Bangladesh. UNICEF bertanggung jawab dalam bidang pemenuhan sarana

sanitasi, air bersih, dan air minum, pemenuhan dalam bidang pendidikan, perlindungan anak.

Bersama dengan IOM yang merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara 169 negara anggota PBB melakukan pengaturan pergerakan pengungsian pengungsi Rohingya dari semenjak dia keluar dari Myanmar hingga sampai di kamp-kamp pengungsian. IOM juga mengatur kondisi pengungsian dan menjamin keselamatan pengungsi Rohingya. IOM berfokus pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan konsultasi medis untuk pengungsi anak Rohingya dikarenakan anak-anak lebih rentan terkenal penyakit dan membutuhkan tempat tinggal untuk bernaung. Pada tahun 2017, IOM menjangkau 184.500 pengungsi dan diantaranya 894 pengungsi anak untuk berkonsultasi medis terkait penyakit diare, gizi buruk dan kolera. IOM melalui *The Mental Health and Psychosocial Services (MHPSS)* melakukan training terhadap 15 staff kesehatan termasuk dokter dan perawat terkait *psychosocial basic support* ([unicef.org](http://unicef.org), 2017).

*World Food Programme (WFP)* berkolaborasi dengan UNICEF dalam memberikan bantuan makanan secara maksimal dan mencegah pengungsi anak Rohingya dari kelaparan. Pada tahun 2017 hingga 2018 terdapat 88 staff untuk menangani kebutuhan pengungsi anak Rohingya melalui *e-food voucher* guna untuk membeli bahan makanan seperti beras, kacang-kacangan, sayuran, telur dan lain-lain.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai upaya UNICEF dalam menangani pengungsi anak di Bangladesh pada tahun 2017-2018 sebagai organisasi internasional yang menjadi aktor/pelaku kemanusiaan dengan Bantuan dana darurat yang berhasil memenuhi sebagian kebutuhan darurat bagi pengungsi anak Rohingya yang baru saja tiba dipengungsian, begitu pun yang telah berada di pengungsian, bantuan tersebut meliputi: air bersih, sarana sanitasi, dan hygiene (wash), dan kesehatan. Menciptakan program perlindungan bagi pengungsi anak Rohingya di kamp pengungsian, yaitu: *Child Friendly Space* dengan membangun sebanyak 97 ruang untuk pengungsi anak Rohingya dan *Adolescent Space* dengan membangun 309 ruang kelompok remaja yang berada di beberapa kamp-kamp pengungsian. Menciptakan program Pendidikan melalui program berbasis kurikulum Myanmar dan program pengembangan keterampilan untuk pengungsi anak dan remaja Rohingya, Pendidikan memiliki peran penting bagi masa depan pengungsi anak Rohingya, anak-anak perlu berkembang dan terus belajar demi memiliki kehidupan yang layak dimasa depan. Tanpa adanya kesempatan untuk belajar, mereka lebih berbahaya menjadi sasaran perdagangan manusia, pernikahan anak, eksploitasi dan pelecehan. Kolaborasi UNICEF dengan mitra kerjanya dalam mewujudkan penanganan jangka panjang bersama Bangladesh dan UNHCR terkait repatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar dengan melakukan kesepakatan *Arrangement on Return of Displaced Persons from Rakhine State* yang berisi untuk melakukan repatriasi terhadap 1.500 orang tiap minggunya kembali ke Myanmar dalam kurun waktu dua tahun dan pemberian kartu identitas "*Myanmar Nationals*" kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh. Kolaborasi UNICEF juga Bersama dengan IOM dalam menata kondisi pengungsian bagi pengungsi Rohingya, melakukan konsultasi medis bagi pengungsi anak Rohingya yang mengalami trauma, dan bersama dengan WFP dalam memenuhi kebutuhan pengungsi anak Rohingya melalui *e-food voucher* guna untuk membeli bahan makanan.

Berdasarkan pada pembahasan yang telah disimpulkan mengenai upaya UNICEF dalam menangani permasalahan pengungsi anak Rohingya di Bangladesh, terdapat saran-saran yang dapat dikemukakan yaitu Bantuan darurat yang diberikan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti kebutuhan makanan, sanitasi, dan pakaian. UNICEF terkait layanan GBV untuk menjangkau pengungsi wanita dan anak perempuan yang membatasi pergerakan untuk dapat menjangkau layanan kesehatan dimana hampir 56% tidak mendapatkan akses manajemen klinis pemerkosaan dan layanan kesehatan terkait organ reproduksi dan seks. Diperlukan adanya sosialisasi terkait layanan GBV tersebut ke kamp-kamp pengungsian untuk dapat menjangkau pengungsi wanita dan anak perempuan secara keseluruhan. Bekerjasama dengan pemerintah Bangladesh membuka lapangan pekerjaan bagi pengungsi Rohingya sehingga pemenuhan kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara maksimal sehingga mereka tidak hanya mengharap pada bantuan kemanusiaan dan UNICEF bisa memfokuskan pada pemenuhan hak-hak anak melalui bantuan kemanusiaan berkelanjutan hingga mereka dewasa. UNICEF hendak bekerjasama dengan Bangladesh membangun sekolah-sekolah formal untuk pengungsi anak Rohingya usia remaja melanjutkan pendidikannya yang sempat terputus.

#### Daftar Pustaka

- “IOM Crisis Rohingya Response”. 2018. Tersedia di <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018-01-25%20-%20IOM%20Rohingya%20Crisis%20Response%20-%20External%20Sitrep.pdf> (diakses pada 24 Desember 2021)
- “UNICEF appeals for US\$76.1 million to assist children affected by Rohingya crisis in Bangladesh”. Tersedia di <https://www.unicef.org/press-releases/unicef-appeals-us761-million-assist-children-affected-rohingya-crisis-bangladesh> , diakses pada tanggal 18 desember 2017
- Joint Response Plan for Rohingya”. 2018. Tersedia di <https://reliefweb.int/report/bangladesh/joint-response-plan-rohingya-humanitarian-crisis-final-report-march-december-2018> (diakses pada 25 september 2019)
- “UNICEF Child Alert: Futures In Balances”. Tersedia di <https://www.unicef.org/reports/futures-balances> , diakses pada tanggal 15 mei 2021.
- “UNICEF Child Alert: Futures In Balances”. Tersedia di <https://www.unicef.org/reports/futures-balances> , diakses pada tanggal 15 mei 2021.
- Kolovos, Pavlo. 2018. “One year rohingya refugees live dire cramps facing uncertain future and legal limbo”. *Rohingya Refugee Crisis*. Tersedia di <http://www.msf.org/> (diakses pada 30 Agustus 2018)
- Death and Violence Against the Rohingya in Rakhine State, Myanmar*. 2018. Tersedia di <http://www.msf.org/> (diakses pada 20 Mei 2019)
- Yasyid, Fasha Nabila. 2017. “Dampak pengusiran etnis rohingya oleh myanmar terhadap keamanan bangladesh”. *eJournal hubungan internasional*. Vol. 5 (4): 1287 – 1300. Samarinda

- Humanitarian Principles*. Tersedia di [https://ec.europa.eu/echo/who/humanitarian-aid-and-civil-protection/humanitarian-principles\\_en](https://ec.europa.eu/echo/who/humanitarian-aid-and-civil-protection/humanitarian-principles_en) (diakses pada 19 Juni 2021)
- Principle and good practice humanitarian donorship. Tersedia di <http://allindiary.org/pool/reource/principles-and-good-practice-of-humanitarian-donorship.pdf> (diakses pada 25 juli 2018)
- Rudy T. May, 2014. *Administrasi Dan Organisasi Internasional*. Jakarta
- Muladi, 2009. *Hak Asasi Manusia*, Bandung : RefikaAditama, Maret 2009.
- Apa saja fungsi fungsi organisasi internasional”, 2017. Tersedia pada <https://www.dictio.id/t/apa-saja-fungsi-fungsi-organisasi-internasional/14603>, diakses pada 11 Januari 2020
- Suryokusumo Sumary. Tahun 1987. *Organisasi Internasional “Bangladesh”*. Tersedia pada [https://www.unicef.org/infobycountry/bangladesh\\_100945.html](https://www.unicef.org/infobycountry/bangladesh_100945.html), diakses pada tanggal 10 November 2017.
- “UNICEF History”. Tersedia pada <https://www.unicef.org/> (diakses pada 25 Oktober 2017)
- “Setiap pekan 12.000 anak-anak Rohingya tiba di kamp yang sudah penuh sesak”. 2017. Tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41693546> (diakses pada 5 November 2017)
- Lee, Ronan. 2021. *Myanmar’s Rohingya Genocide*. London : Bloomsbury Publishing.
- Ahmed, Kawser dan Helal Mohiuddin. 2020. *Rohingya’s Crisis*. London : Lexington Books
- Myanmar/Bangladesh: ‘No one was left’ - Death and Violence Against the Rohingya. Tersedia di <http://www.msf.org/en/article/myanmarbangladesh-no-one-was-left-death-and-violence-against-rohingya>, diakses pada tanggal 15 April 2018
- Reidy, Karen. “Expanding Education fo Rohingya Refugee Children in Bangladesh”. Tersedia di <https://www.unicef.org/rosa/stories/expanding-education-rohingya-refugee-children-bangladesh> (diakses pada 30 November 2021)